

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan adalah sebuah usaha pencapaian kesejahteraan sosial melalui pembangunan ekonomi (Marini, 2016). Dasarnya pembangunan ekonomi yakni proses yang menyiratkan bermacam perubahan pada struktur sosial, sikap psikologis warga, serta institusi negara, juga berusaha mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengurangi perbedaan pendapatan, dan mengurangi kemiskinan. Dalam hal tersebut, pembangunan ekonomi juga sebagai pendorong pemerataan pembangunan sehingga masyarakat bisa merasakan kesejahteraan. Salah satu dari tujuan suatu negara yaitu melakukan pembangunan ekonomi, dimana suatu negara bisa dikatakan maju apabila terdapat peningkatan dalam pembangunan. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dapat menjadi acuan dari berhasilnya pembangunan ekonomi (Zuhdiyati, 2017).

Pembangunan nasional pada dasarnya merupakan unsur yang digunakan untuk menaikkan kesejahteraan dan kemakmuran warga secara adil dan merata (Simatupang, 2003). Perwujudan kesejahteraan masyarakat salah satunya yaitu dengan mengurangi tingkat kemiskinan. Pertimbangan utama memilih strategi atau instrumen pembangunan merupakan kemampuannya pada penurunan jumlah kemiskinan (Simatupang, 2003). Tingkat kemiskinan sudah menjadi tujuan dari dasar pembangunan serta alat untuk mengukur dampak implementasi dari berbagai jenis rencana pembangunan.

Kemiskinan adalah ketidakmampuan individu atau kelompok orang untuk sampai pada kemakmuran ekonomi, yang menjadi persyaratan minimum untuk

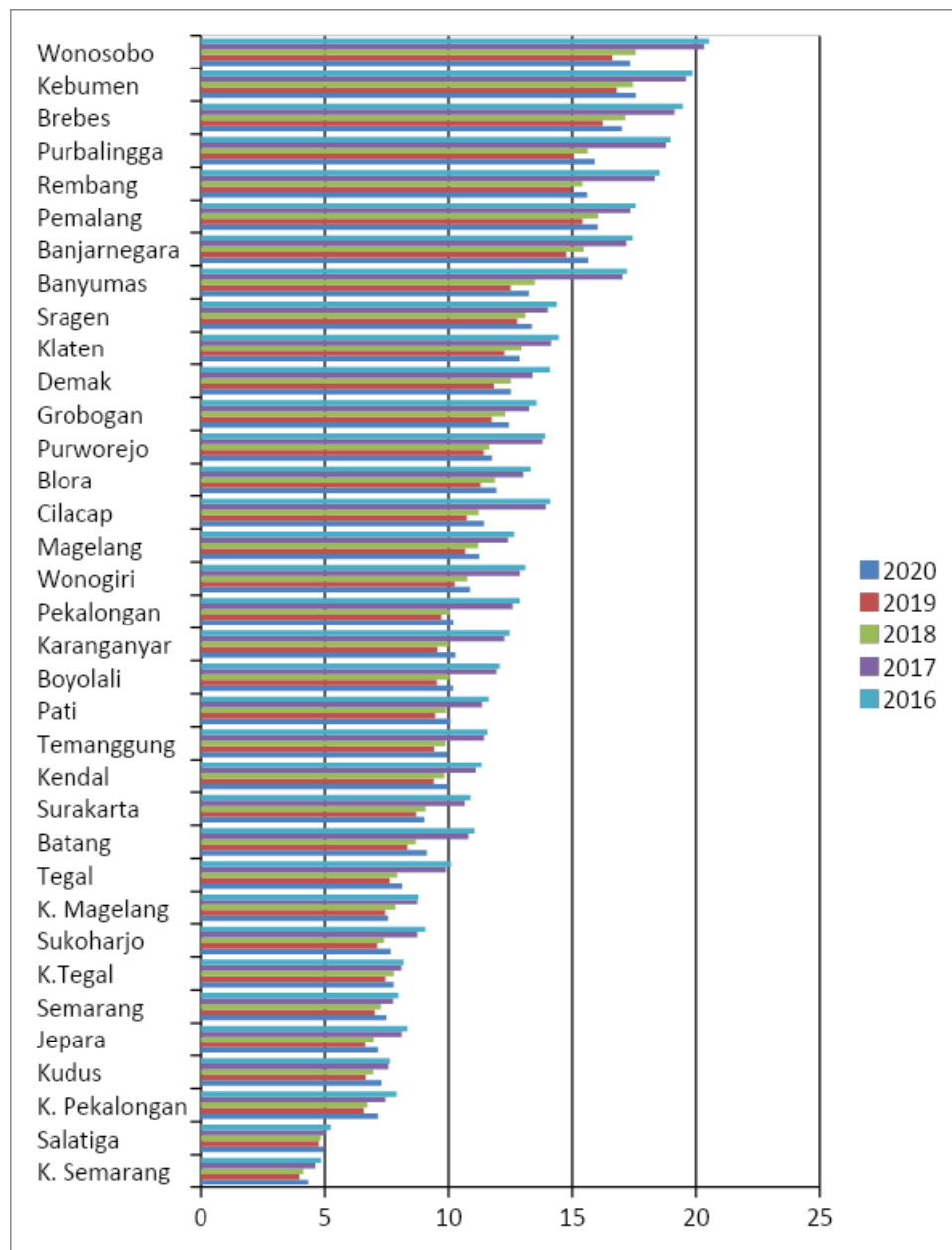
standar hidup tertentu. Dengan kata lain, kemiskinan bisa berarti sebuah keadaan saat seseorang tidak dapat meningkatkan kebutuhan dasar dan kualitas hidupnya (Putri, Junaidi & Mustika, 2019). Badan Pusat Statistik melihat kemiskinan menurut segi ekonomi yakni ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan pokok makanan dan barang yang pengukurannya dari segi pengeluaran.

Kemiskinan ialah urusan rumit global yang sulit diselesaikan. Khususnya pada negara yang sedang berkembang, kemiskinan seringkali menjadi urusan pokok atau masalah utama di negaranya. Menurut M. Nasir dalam Setya Ningrum (2017) masalah kemiskinan menjadi masalah kompleks dan banyak penyebabnya serta bersifat multidimensional. Maka untuk menyelesaikan masalah kemiskinan harus diberlakukan kebijakan secara menyeluruh dan teratur.

Indonesia sebagai negara sedang berkembang juga memiliki masalah dengan tingginya jumlah kemiskinan. Masalah kemiskinan di Indonesia sudah terjadi sejak dahulu saat pemerintah Indonesia tidak dapat mengurangi jumlah kemiskinan dari tahun ke tahun, sehingga kemiskinan menjadi fokus utama pekerjaan pemerintah sampai saat ini. Hal ini karena pemerintah menyadari bahwa kemiskinan yang gagal diatasi akan menimbulkan banyak masalah sosial, ekonomi, dan politik di masyarakat (Siti Walida, 2015).

Pulau Jawa bukan hanya sebagai tempat pembangunan ekonomi namun juga merupakan pusat banyaknya jumlah penduduk miskin. Salah satunya terjadi pada Provinsi Jawa Tengah, dari data Badan pusat statistik (BPS) jumlah penduduk miskin Jawa Tengah pada tahun 2020 termasuk yang terbesar ketiga yaitu sebanyak 4.119,93 jiwa setelah Jawa Timur sebanyak 4.585,97 jiwa dan

Jawa Barat sebanyak 4.188,52 jiwa. Artinya kemiskinan di Jawa Tengah menurun, yang pada tahun sebelumnya selalu memiliki jumlah penduduk miskin terbesar kedua setelah Jawa Timur. Kemiskinan di Jawa Tengah tidak hanya terjadi pada satu titik namun menyebar di daerah-daerah sebagai berikut:



Gambar 1.1 Persentase Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016-2020

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2021 (diolah)

Berdasarkan tabel 1.1 menurut Badan Pusat Statistik (BPS) persentase kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah menurut Kabupaten/kota tahun 2016-2020 selalu mengalami penurunan, ini merupakan hal baik artinya usaha pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan cukup berhasil. Rataan kemiskinan Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2016-2020 yang menduduki posisi paling tinggi yaitu pada Kabupaten Wonosobo dengan persentase pada tahun 2016 sebesar 20,53% kemudian turun pada tahun 2020 menjadi 17,36%. Selanjutnya diikuti Kabupaten Kebumen pada posisi tertinggi kedua dengan persentase kemiskinan pada tahun 2016 sebesar 19,86% kemudian turun pada tahun 2020 menjadi 17,59%. Kemiskinan yang terendah yaitu Kota Semarang dengan persentase kemiskinan di 2016 sebesar 4,85% dan sempat turun menjadi 3,98% pada tahun 2019 (BPS, 2021b)

Kabupaten Blora yang dijuluki daerah tambang minyak juga mengalami masalah kemiskinan dengan berada di urutan 13 tertinggi dari 35 kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah, dengan persentase kemiskinan tahun 2016 sebesar 13,33% kemudian tahun 2019 menjadi 11,32% atau mengalami penurunan tetapi pada tahun 2020 naik sebesar 0,64% sehingga persentase kemiskinannya 11,96%. Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora dalam Publikasi Profil Kemiskinan Kabupaten Blora 2020, kenaikan kemiskinan ini terjadi karena beberapa hal misalnya dengan harga sembako, kenaikan harga BBM, dan karena pandemi Covid-19 di awal Maret 2020 (BPS, 2020).

Pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan memiliki hubungan yang dekat. Secara teoritis, pertumbuhan ekonomi adalah usaha dalam pengukuran pembangunan wilayah serta bisa mengatasi masalah penurunan kemiskinan. Ini

terjadi apabila hasil pertumbuhan ekonomi terdistribusi dengan baik di berbagai tingkatan warga, terutama pada tingkat warga kurang mampu (Siregar and Wahyuniarti, 2008). Secara langsung, artinya pertumbuhan harus terjadi pada sektor yang menjadi pekerjaan penduduk kurang mampu (pertanian atau sektor padat karya). Sementara secara tidak langsung, hal tersebut dibutuhkan pemerintah yang bisa meratakan kegunaan pertumbuhan yang diperoleh dari sektor seperti jasa dan manufaktur yang memiliki banyak modal.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi adalah kemakmuran faktor-faktor produksi yang membuat kekayaan, yaitu semakin besar tingkat ekonomi tumbuh, semakin besar produktivitas faktor-faktor produksi tersebut. Apabila ekonomi bertumbuh lebih tinggi dari sebelumnya maka perekonomian bisa disebut tumbuh atau berkembang (Kuncoro, 2003). Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, suatu negara bisa sampai kemakmuran dan kemakmuran ekonomi peningkatan pertumbuhan ekonomi menunjukkan jika produksi sebuah negara meningkat.

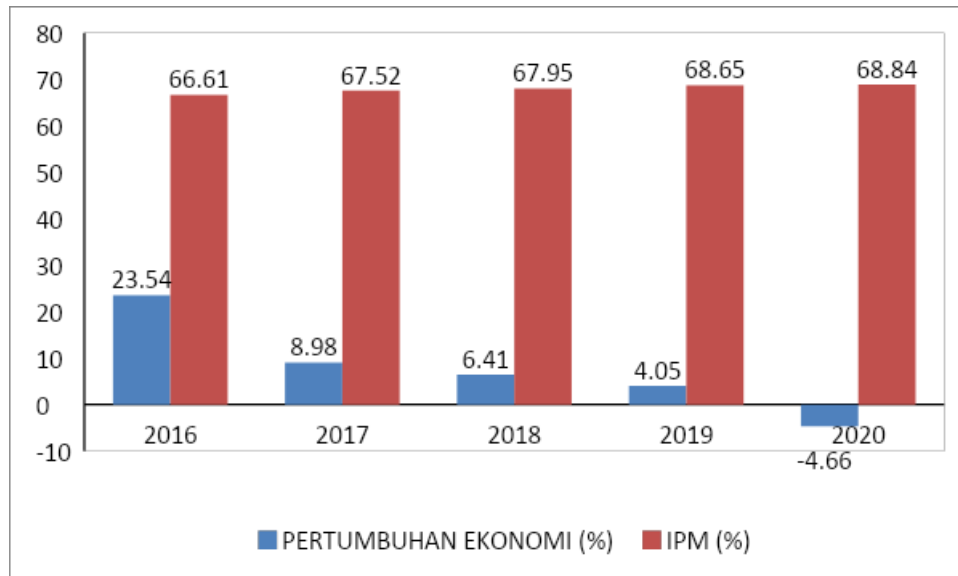
Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Blora penopang utamanya yaitu pada sektor pertambangan dan penggalian karena terdapat cadangan minyak bumi atau dikenal dengan daerah tambang minyak. Kemudian sektor pertanian, perkebunan dan perikanan juga menjadi sektor pendukung pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Blora. Namun, kemiskinan masih menjadi masalah utama di Kabupaten Blora saat ini, sehingga masih perlu berbagai usaha atau kebijakan untuk menurunkan angka kemiskinan.

Kemiskinan juga dekat hubungannya dengan kualitas sumber daya manusia. Keadaan tersebut kualitas SDM dapat tercermin pada Indeks Pembangunan Manusia. IPM mempunyai beberapa indikator yang berperan

penting yaitu kesehatan, pendidikan, dan pendapatan (Ardiansyah D.P. and Pramono, 2019). IPM yang rendah berpengaruh terhadap rendahnya produktivitas kinerja masyarakat. Sedangkan rendahnya produktivitas akan menyebabkan rendahnya pendapatan yang diperoleh. Sehingga pendapatan yang rendah akan membuat kenaikan pada kemiskinan.

Dalam Badan Pusat Statistik (BPS) IPM dapat memaparkan bagaimana warga memiliki akses ke hasil pembangunan yang terkait dengan pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan lainnya. IPM dapat digunakan untuk mengetahui termasuk dalam kategori maju atau berkembangnya suatu negara, serta menjadi alat ukur untuk mengetahui pengaruh kebijakan ekonomi terhadap suatu negara (Setya Ningrum, 2017).

Pembangunan manusia di Indonesia yaitu sama dengan berkurangnya kemiskinan (Yani, 2008). Sehingga, sasaran dari pembangunan ekonomi tidak hanya peningkatan pendapatan ekonomi, tapi juga mengarah pada kualitas pembangunan manusia. Pentingnya pembangunan manusia dalam proses pembangunan ekonomi menjadikannya salah satu tujuan pembangunan untuk mengentaskan kemiskinan. Adanya fasilitas pendidikan dan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas dapat membuat produktivitas dan pendapatan meningkat sehingga indeks pembangunan Manusia juga naik. Secara empiris peningkatan pada kualitas IPM adalah salah satu cara pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan.



Gambar 1.2 Persentase Pertumbuhan Ekonomi dan IPM Kabupaten Blora Tahun 2016-2020

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora, 2021 (diolah)

Dilihat dari gambar 1.2 menurut badan pusat statistik (BPS) pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Blora selama tahun 2016 sampai 2020 selalu mengalami penurunan, ini berbanding terbalik dengan persentase Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang selama tahun 2016 sampai 2020 selalu meningkat setiap tahunnya. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blora pada tahun 2016 yaitu mencapai 23,54% persentase ini termasuk tertinggi dari tahun sebelumnya, hal ini terjadi karena adanya peningkatan pada perekonomian sektor pertambangan dan penggalian. Sedangkan persentase IPM tahun 2016 sebesar 66,61% ini termasuk nilai persentase yang paling rendah dari periode 2016-2020.

Untuk tahun selanjutnya pertumbuhan ekonomi selalu mengalami penurunan sedangkan persentase IPM selalu mengalami peningkatan meskipun tidak banyak. Pada tahun 2020 persentase pertumbuhan ekonomi turun menjadi -4,66% yang sebelumnya pada tahun 2019 sebesar 4,05%. Penurunan tersebut disebabkan karena dalam masa pandemi seluruh kegiatan terbatas sehingga

berdampak pada hampir seluruh sektor mengalami penurunan. Sedangkan persentase IPM pada tahun 2020 mengalami kenaikan yang tidak signifikan yaitu menjadi 68,84% yang sebelumnya pada tahun 2019 sebesar 68,65%.

Selain pertumbuhan ekonomi dan IPM, dalam hal ini pemerintah juga berperan penting dalam mengurangi kemiskinan. Pengaruh pemerintah sangat penting dalam pembuatan keputusan atau kebijakan yang bersifat memihak warga kurang mampu. Meskipun ekonomi bertumbuh tetapi tanpa campur tangan pemerintah maka masyarakat kurang mampu tidak bisa merasakan karena pasar yang bekerja tidak sempurna (Izzati, 2018). Berbagai upaya pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat salah satunya dengan mengelola keuangan perekonomian baik penerimaan maupun belanja pemerintah yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Menurut Wanger bahwa dalam menyediakan barang dan jasa publik belanja pemerintah berperan penting, dengan tersedianya barang dan jasa publik dapat menjadi penentu terkumpulnya modal dan investasi dari swasta maupun masyarakat alhasil ekonomi akan tumbuh (Yulianita, 2009). Adanya pertumbuhan yang besar maka ada pengeluaran pemerintah yang besar juga. Jika perekonomian ini berjalan dengan baik, tentu akan menciptakan lebih banyak lapangan kerja atau peluang usaha dalam pertumbuhan ekonomi, sehingga mengurangi kemiskinan secara keseluruhan (Parasan, Rotinsulu and Layuck, 2016). Pengeluaran belanja pemerintah juga bisa dipakai menjadi salah satu ciri kegiatan yang dibiayai pemerintah termasuk besar, karena semakin besar dan banyak aktivitas yang dilaksanakan pemerintah maka juga akan besar pengeluaran pemerintah.

Berikut merupakan banyaknya belanja pemerintah yang dikeluarkan pada tahun 2016-2020:

Tahun	Belanja Pemerintah (Juta Rupiah)	Perkembangan (Juta Rupiah)
2016	1.964.189,00	
2017	1.981.347,00	17.158,00
2018	2.116.476,00	135.129,00
2019	2.196.378,00	79.902,00
2020	2.055.274,50	-141.103,50

Tabel 1.1 Belanja Pemerintah Kabupaten Blora Tahun 2016-2020

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora, 2021 (diolah)

Berdasarkan tabel 1.1 menurut badan pusat statistik (BPS) belanja pemerintah Kabupaten Blora selalu mengalami kenaikan setiap tahun. Pengeluaran pemerintah Kabupaten Blora pada tahun 2016 sebanyak Rp 1.964.189,00 kemudian naik paling tinggi yaitu pada tahun 2019 mencapai Rp 2.196.378,00. Dengan meningkatnya pengeluaran tersebut sebanding dengan pembangunan infrastruktur yang ada di Kabupaten Blora yang mulai membaik. Sedangkan pada tahun 2020 pengeluaran pemerintah mengalami penurunan dikarenakan adanya virus *covid-19* sehingga pembangunan proyek di Kabupaten Blora berhenti sementara.

Penelitian tentang kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi sudah biasa dilakukan sebelumnya, diantaranya (Nadhifah, 2018), (Ishak, Zakaria and Arifin, 2020), dan (Baihaqi and Puspitasari, 2020) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi atau PDRB dapat memberikan pengaruh besar terhadap kemiskinan. Ada juga penelitian yang dilaksanakan oleh (Panggabea and Matondang, 2019) dan (Izzati, 2018) menyebutkan jika pertumbuhan ekonomi tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan.

Selanjutnya, penelitian tentang indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan juga sebelumnya sudah banyak dilakukan antara lain (Dharmmayukti, Rotinsulu and Niode, 2021) dan (Baihaqi and Puspitasari, 2020) menjelaskan dalam penelitiannya bahwa indeks pembangunan manusia berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, namun penelitian yang dilaksanakan (Panggabea and Matondang, 2019) menyebutkan jika indeks pembangunan manusia tidak memiliki pengaruh terhadap kemiskinan.

Sementara penelitian tentang belanja pemerintah dan kemiskinan sebelumnya sudah banyak diteliti, (Izzati, 2018) dan (Ketaren, 2018) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa belanja atau pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh besar dalam mengurangi kemiskinan. Sedangkan penelitian yang dilaksanakan oleh (Panggabea and Matondang, 2019) menjabarkan jika belanja atau pengeluaran pemerintah kurang berperan terhadap kemiskinan.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini karena tingkat kemiskinan di Kabupaten Blora pada tahun 2016-2020 mengalami penurunan namun belum signifikan. Selain itu hasil penelitian sebelumnya tidak seragam dan tidak konsisten, maka menurut peneliti masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis tertarik untuk menggunakan judul **“Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia dan Belanja Pemerintah Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Blora”**.

12 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pertumbuhan ekonomi mempengaruhi kemiskinan di kabupaten Blora?
2. Apakah indeks pembangunan manusia mempengaruhi kemiskinan di Kabupaten Blora?
3. Apakah belanja pemerintah mempengaruhi kemiskinan pada Kabupaten Blora?
4. Apakah pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia dan belanja pemerintah secara simultan berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten Blora?

13 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka diperoleh tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Kabupaten Blora.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan di Kabupaten Blora.
3. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh belanja pemerintah terhadap kemiskinan di Kabupaten Blora.
4. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia dan belanja pemerintah secara simultan terhadap kemiskinan di Kabupaten Blora.

14 Ruang Lingkup Penelitian

1. Penelitian menggunakan series data dari periode tahun 2009 sampai tahun 2020 di Kabupaten Blora.
2. Variabel yang digunakan pada penelitian kemiskinan menjadi variabel terikat dan pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia dan belanja pemerintah menjadi variabel bebas.

15 Manfaat Penelitian

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi manfaat untuk mengentaskan kemiskinan.
2. Menjadi referensi untuk peneliti selanjutnya yang ingin meneliti topik yang sama supaya bisa memperbaiki kekurangan-kekurangan yang terdapat pada penelitian ini.
3. Menjadi masukan untuk Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menyusun kebijakan perencanaan pembangunan yang utama pada bidang ekonomi dalam memahami faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan sehingga dapat diketahui faktor-faktor yang harus dilakukan dalam menangani masalah kemiskinan masyarakat di Indonesia pada umumnya dan Kabupaten Blora pada khususnya.